

STUDI KASUS

Nama : Mar'atus Shalihah
NPM : 2313031025
Kelas : A
Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan

1. Analisis Struktur Pengeluaran

a. Apakah Struktur Belanja Pendidikan di Nusantara Raya Sudah Efisien?

Secara sederhana, efisiensi pembiayaan pendidikan bukan hanya soal seberapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi sejauh mana anggaran itu menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan. Di sinilah letak permasalahan Provinsi Nusantara Raya: meskipun anggaran pendidikan sudah mencapai 22% dari APBD, angka yang terbilang cukup besar, namun hasil belajar siswa masih berada di bawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan adanya masalah efektivitas, bukan sekadar kekurangan dana.

Penyebab utamanya cukup jelas: sebesar 68% anggaran pendidikan terserap untuk gaji dan tunjangan guru. Proporsi ini jauh melampaui standar ideal yang umumnya berkisar di angka 50-60% dalam praktik internasional. Akibatnya, komponen belanja lain yang seharusnya berkontribusi langsung pada peningkatan mutu pendidikan, seperti infrastruktur digital, bantuan siswa, dan pelatihan guru, mendapatkan porsi yang sangat kecil. Kondisi ini diperparah oleh distribusi guru yang timpang: menumpuk di perkotaan, sementara daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik. Artinya, belanja gaji yang besar pun tidak diimbangi dengan pemerataan layanan pendidikan.

Berikut gambaran komposisi belanja saat ini beserta usulan realokasi yang lebih proporsional:

Komponen Belanja	Porsi Saat Ini	Usulan Realokasi	Keterangan
Gaji & Tunjangan Guru	68%	55%	Terlalu dominan
Infrastruktur & Digital	12%	20%	Perlu ditingkatkan
Bantuan Siswa	8%	15%	Masih kurang
Pengembangan Guru	0%	7%	Belum ada alokasi
Administrasi & Lainnya	12%	3%	Perlu diefisienkan

b. Bagian Mana yang Perlu Direalokasi? Mengapa?

Berdasarkan analisis di atas, ada beberapa komponen anggaran yang perlu ditata ulang. Pertama, efisiensi belanja gaji perlu dilakukan, bukan dengan memangkas kesejahteraan guru, melainkan melalui redistribusi guru dari daerah yang surplus ke daerah yang kekurangan. Dengan demikian, anggaran yang sama bisa menghasilkan dampak yang lebih merata.

Kedua, alokasi untuk infrastruktur digital harus ditingkatkan dari 12% menjadi sekitar 20%. Keterbatasan akses digital menjadi salah satu faktor utama yang memperlebar ketimpangan antara sekolah kota dan desa. Ketiga, bantuan siswa perlu diperbesar dari 8% menjadi 15% agar sistem pembiayaan lebih berorientasi pada kebutuhan (*need-based funding*), terutama untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan daerah tertinggal.

Hal yang menarik, dalam struktur anggaran saat ini sama sekali tidak ada alokasi khusus untuk pelatihan dan pengembangan guru. Padahal, penelitian-penelitian di bidang ekonomi pendidikan secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas guru adalah faktor paling berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Mengalokasikan sekitar 7% dari anggaran untuk pengembangan kompetensi guru seharusnya menjadi prioritas, bukan pilihan opsional. Terakhir, porsi administrasi yang mencapai 12% perlu dipangkas melalui digitalisasi tata kelola, sehingga dana bisa dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

a. Apakah Pembiayaan Masih Terlalu Bergantung pada Pemerintah Daerah?

Jawabannya ya. Pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya saat ini hampir sepenuhnya bertumpu pada APBD, dan ini menjadi sumber kerentanan tersendiri. Ketika kondisi fiskal daerah melemah, misalnya karena penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka anggaran pendidikan pun ikut terdampak. Ini bukan kondisi yang ideal untuk sektor yang membutuhkan investasi jangka panjang dan konsisten.

Selain itu, ketergantungan pada APBD membuat mayoritas anggaran terpakai untuk belanja rutin (terutama gaji), sehingga sangat sedikit ruang yang tersisa untuk program-program inovatif dan investasi strategis. Dalam kondisi seperti ini, reformasi pendidikan yang ambisius akan sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pembiayaan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.

b. Perlukah Melibatkan Sektor Swasta atau Skema Alternatif? Jelaskan model yang tepat.

Tentu perlu. Keterlibatan sektor swasta dan pengembangan skema pembiayaan alternatif dapat memperkuat kapasitas pendanaan pendidikan tanpa harus membebani APBD secara berlebihan. Beberapa model yang relevan untuk diterapkan di Nusantara Raya antara lain:

1) Kemitraan Publik-Swasta (PPP)

Model ini memungkinkan pihak swasta berperan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama sarana digital, dengan skema *build-operate-transfer*. Pemerintah tetap memegang kendali atas standar dan regulasi pendidikan, sementara swasta berkontribusi dari sisi investasi dan teknologi.

2) *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Nusantara Raya dapat didorong untuk mengarahkan program CSR-nya ke sektor pendidikan secara lebih terstruktur. Pemerintah daerah perlu menyediakan peta kebutuhan sekolah yang transparan, agar CSR tidak sekadar bersifat seremonial tetapi benar-benar tepat sasaran.

3) Dana Abadi Pendidikan Daerah

Pembentukan *education endowment fund* yang modalnya berasal dari APBD, donasi swasta, dan hibah merupakan solusi jangka panjang yang menarik. Pokok dana tidak disentuh; hanya hasil investasinya yang digunakan untuk membiayai beasiswa dan program pengembangan guru. Dengan cara ini, keberlanjutan program tidak lagi bergantung pada siklus anggaran tahunan yang sering tidak menentu.

4) Optimalisasi Transfer Pusat

Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dari pusat, khususnya untuk program digitalisasi dan daerah 3T. Memanfaatkan skema *results-based financing* juga bisa menjadi sumber dana tambahan, asalkan Nusantara Raya mampu menunjukkan capaian yang terukur dan dapat diverifikasi.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

a. Elemen OECD yang Realistis Diadopsi

Negara-negara OECD telah mengembangkan berbagai model pembiayaan pendidikan yang terbukti efektif. Namun, tidak semua elemen bisa langsung diadopsi begitu saja di konteks Indonesia. Tabel berikut merangkum elemen-elemen yang paling relevan beserta tantangan implementasinya:

Elemen OECD	Relevansi bagi Nusantara Raya	Tantangan Implementasi
<i>Performance-Based Budgeting</i>	Mendorong akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran	Sistem data dan kapasitas SDM belum siap
<i>Need-Based Funding</i>	Solusi konkret untuk kesenjangan kota-desa	Data sosial-ekonomi siswa belum akurat dan terintegrasi
Kualitas Guru sebagai Prioritas	Langsung menysasar akar masalah mutu pendidikan	Distribusi tidak merata dan resistensi perubahan
Evaluasi Berbasis Data	Memungkinkan kebijakan yang tepat sasaran	Infrastruktur digital dan integrasi sistem masih lemah

Dari keempat elemen tersebut, *need-based funding* dan peningkatan kualitas guru dinilai paling mendesak dan paling realistis untuk segera dijalankan, karena keduanya langsung menyentuh akar masalah yang ada di Nusantara Raya. Sementara *performance-based budgeting* dan evaluasi berbasis data memerlukan fondasi sistem yang lebih kuat, sehingga perlu dibangun secara bertahap.

b. Tantangan Implementasi di Konteks Indonesia

Mengadopsi praktik OECD di Indonesia bukan tanpa hambatan. Ada beberapa tantangan struktural yang perlu diantisipasi sejak awal:

1) Infrastruktur digital yang belum merata

Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, belum memiliki akses internet yang stabil. Ini menjadi hambatan serius dalam penerapan sistem evaluasi berbasis data maupun program digitalisasi pembelajaran.

2) Kapasitas SDM yang terbatas

Penganggaran berbasis kinerja membutuhkan tenaga perencana dan analis yang kompeten. Di tingkat kabupaten dan provinsi, profil SDM untuk fungsi ini masih sangat kurang, sehingga perlu ada investasi serius dalam peningkatan kapasitas aparatur pendidikan.

3) Resistensi birokrasi

Sistem yang sudah bertahun-tahun berjalan dengan pola input-based tidak mudah diubah. Pergeseran menuju *performance-based budgeting* akan menghadapi resistensi

dari berbagai pihak yang merasa terancam oleh perubahan sistem. Manajemen perubahan yang terencana menjadi kunci.

4) Basis data yang belum terintegrasi

Need-based funding memerlukan data yang akurat dan terbaru tentang kondisi siswa, sekolah, dan wilayah. Saat ini, data antara Dapodik, BPS, dan dinas pendidikan daerah masih sering tidak sinkron.

5) Regulasi yang tumpang tindih

Pembiayaan pendidikan melibatkan banyak regulasi dari tingkat pusat hingga daerah yang kadang saling bertentangan. Harmonisasi regulasi ini membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang tidak mudah dan tidak cepat.

4. Rancangan Reformasi

Susun proposal singkat reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup:

- Perubahan struktur belanja
- Strategi peningkatan kualitas guru
- Digitalisasi sekolah
- Mekanisme monitoring dan evaluasi

PROPOSAL REFORMASI PENDIDIKAN

I. Latar Belakang

Provinsi Nusantara Raya menghadapi paradoks yang cukup serius: anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan cukup besar ternyata belum mampu mengangkat kualitas pendidikan ke level yang diharapkan. Skor literasi dan numerasi masih di bawah rata-rata nasional, ketimpangan antara sekolah kota dan desa masih tinggi, serta distribusi guru yang tidak merata menjadi masalah yang terus berulang. Akar permasalahannya bukan pada besaran anggaran, melainkan pada bagaimana anggaran itu dialokasikan dan digunakan.

Reformasi pembiayaan ini dirancang sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis bukti dan belajar dari praktik terbaik negara-negara OECD yang disesuaikan dengan konteks lokal, reformasi ini diharapkan dapat mendorong perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

II. Tujuan Reformasi

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.
2. Mendorong pemerataan pendidikan antara wilayah kota dan daerah terpencil.
3. Meningkatkan kompetensi dan pemerataan distribusi guru.
4. Mempercepat digitalisasi sekolah sebagai fondasi pembelajaran modern.
5. Membangun sistem pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan tidak terlalu bergantung pada APBD.

III. Rencana Reformasi 5 Tahun

Tahun	Program Utama	Target	Indikator
1	Audit guru & anggaran; penyusunan regulasi reformasi	Peta distribusi guru selesai; regulasi ditetapkan	Dokumen regulasi terbit
2	Redistribusi guru; pilot digitalisasi 100 sekolah; pelatihan guru	100 sekolah terhubung internet; 500 guru terlatih	Skor literasi naik 5%

Tahun	Program Utama	Target	Indikator
3	BOS+ berbasis kebutuhan; perluasan digital 500 sekolah	50% sekolah terkoneksi; beasiswa bertambah 30%	Ketimpangan berkurang 15%
4	PBB penuh; kemitraan swasta (PPP/CSR) aktif	Dana swasta masuk sistem; rasio guru ideal	Putus sekolah turun 20%
5	Evaluasi komprehensif & penyesuaian kebijakan	Sistem mandiri dan berkelanjutan	Literasi & numerasi di atas rata-rata nasional

IV. Perubahan Struktur Belanja

Restrukturisasi belanja dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan yang kontraproduktif. Pada tahun pertama, fokusnya adalah melakukan audit menyeluruh terhadap posisi dan distribusi guru, sekaligus menyusun regulasi yang menjadi payung hukum reformasi. Hasil audit ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk memulai redistribusi guru dari wilayah surplus ke wilayah yang kekurangan.

Mulai tahun kedua, moratorium penerimaan guru baru diberlakukan di wilayah yang sudah terpenuhi. Dana yang berhasil diefisienkan kemudian dialihkan secara bertahap ke komponen yang lebih berdampak: infrastruktur digital, pengembangan kompetensi guru, dan penguatan bantuan siswa. Skema BOS+ berbasis kebutuhan mulai diujicobakan pada tahun ketiga, di mana sekolah di daerah terpencil dan miskin mendapatkan bobot alokasi yang lebih besar.

Pada tahun keempat dan kelima, penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) diterapkan secara penuh. Sekolah yang menunjukkan peningkatan capaian belajar mendapatkan insentif anggaran, sementara sekolah yang stagnan mendapat pendampingan intensif. Bersamaan dengan itu, skema pembiayaan alternatif seperti PPP, CSR, dan dana abadi pendidikan mulai diaktifkan untuk mengurangi ketergantungan pada APBD.

V. Strategi Peningkatan Kualitas Guru

Guru adalah faktor paling penting dalam menentukan mutu pendidikan. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas guru menjadi pilar utama dalam reformasi ini, dengan

fokus pada tiga hal: pemerataan distribusi, peningkatan kompetensi, dan sistem rekognisi yang adil.

Untuk pemerataan distribusi, skema insentif relokasi yang menarik disiapkan bagi guru yang bersedia bertugas di daerah terpencil, mencakup tunjangan khusus, fasilitas perumahan, dan percepatan kenaikan pangkat. Keputusan redistribusi didasarkan pada pemetaan berbasis data geospasial yang menggambarkan sebaran guru secara *real-time*. Dari sisi kompetensi, seluruh guru wajib mengikuti pelatihan pedagogis dan digital minimal 40 jam per tahun. Kelompok Kerja Guru (KKG dan MGMP) direvitalisasi sebagai ruang belajar profesional berbasis komunitas yang difasilitasi dan didanai pemerintah daerah. Program mentoring juga dikembangkan agar guru-guru senior dapat berbagi pengalaman dengan rekan-rekannya di daerah terpencil, baik melalui kunjungan langsung maupun supervisi digital.

Untuk rekognisi, evaluasi kinerja guru dilakukan secara berkala dengan pendekatan multi-sumber: hasil belajar siswa, observasi kelas, dan portofolio pengembangan diri. Guru-guru berprestasi mendapatkan penghargaan berupa insentif finansial dan kesempatan melanjutkan studi, sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk terus berkembang.

VI. Program Digitalisasi Sekolah

Digitalisasi sekolah bukan sekadar soal pengadaan perangkat, melainkan transformasi menyeluruh terhadap ekosistem pembelajaran. Program ini dilaksanakan dalam tiga fase selama lima tahun.

- 1) Fase pertama (tahun 1-2) dimulai dengan koneksi internet untuk 100 sekolah pilot (sekolah percontohan) yang dipilih secara representatif dari berbagai wilayah, yaitu perkotaan, semi-urban, dan pedesaan. Bersamaan dengan itu, perangkat dasar seperti laptop untuk guru dan laboratorium komputer untuk siswa mulai diadakan, disertai pelatihan literasi digital tahap awal.
- 2) Fase kedua (tahun 2-4) memperluas jangkauan ke 500 sekolah, termasuk di daerah terpencil dengan menggunakan solusi teknologi yang adaptif seperti internet satelit dan sumber energi mandiri. Platform pembelajaran digital berbasis kurikulum Merdeka Mengajar dikembangkan atau diadopsi dengan kemampuan akses offline, mengingat masih banyak daerah dengan konektivitas terbatas.
- 3) Fase ketiga (tahun 4-5) menargetkan 90% sekolah negeri sudah terkoneksi dengan infrastruktur digital dasar. Administrasi sekolah pun beralih ke sistem digital sepenuhnya, mulai dari absensi, pengelolaan nilai, hingga pelaporan berbasis data.

Evaluasi dampak digitalisasi terhadap capaian belajar dilakukan pada akhir periode sebagai dasar kebijakan lanjutan.

VII. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Reformasi tanpa sistem pengawasan yang kuat berisiko kehilangan arah. Mekanisme monitoring dan evaluasi dirancang untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan menghasilkan dampak yang nyata.

Aspek yang Dipantau	Mekanisme	Frekuensi
Penggunaan anggaran pendidikan	Laporan keuangan digital dan audit independen	Per semester
Capaian belajar siswa	Asesmen Nasional dan tes diagnostik sekolah	Tahunan
Distribusi dan kinerja guru	Sistem informasi guru terintegrasi	Per triwulan
Perkembangan infrastruktur digital	Survei kesiapan teknologi sekolah	Per semester
Ketepatan penerima bantuan siswa	Verifikasi data berbasis DTKS	Tahunan

Selain pemantauan rutin, evaluasi strategis dilakukan di akhir tahun kedua dan keempat oleh tim independen yang terdiri dari akademisi, praktisi pendidikan, auditor keuangan, dan perwakilan masyarakat. Hasil evaluasi dipublikasikan secara terbuka melalui portal transparansi anggaran pendidikan yang bisa diakses siapa saja. Mekanisme pengaduan masyarakat juga disediakan agar informasi dari lapangan dapat langsung menjangkau pengambil kebijakan.

Indikator keberhasilan utama yang ditetapkan antara lain: skor literasi dan numerasi siswa naik di atas rata-rata nasional dalam 5 tahun, ketimpangan kualitas antara sekolah kota dan desa berkurang minimal 20%, rasio guru-siswa yang seimbang di seluruh wilayah, serta 90% sekolah negeri terkoneksi dengan infrastruktur digital yang layak.

VIII. Penutup

Reformasi pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya adalah langkah yang tidak bisa ditunda lebih lama. Persoalannya bukan lagi soal apakah kita memiliki cukup dana, melainkan apakah kita memiliki keberanian dan komitmen untuk menggunakannya dengan cara yang lebih cerdas dan tepat sasaran.

Proposal ini tidak menawarkan solusi instan. Perubahan mendasar dalam sistem pembiayaan pendidikan membutuhkan waktu, konsistensi, dan dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, guru, orang tua, hingga sektor swasta. Namun jika setiap langkah dijalankan dengan sungguh-sungguh dan dievaluasi secara jujur, Nusantara Raya memiliki potensi besar untuk keluar dari lingkaran masalah yang sudah lama membelit sektor pendidikannya. Pada akhirnya, investasi terbaik sebuah daerah adalah investasi pada kualitas manusianya. Dan pendidikan yang berkualitas adalah jalan terbaik menuju ke sana.